



# Dewan Malas, Dua Ranperda Ditunda

## Rapat Pansus II hanya Dihadiri Empat sampai Enam Anggota Dewan

**SINGARAJA** - Meski mendapat mandat dari rakyat. Ternyata, kelakuan wakil rakyat di Bumi Panji Sakti, Buleleng, tak patut ditiru. Apa sebab? Banyak anggota dewan yang malas untuk hadir dalam rapat pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda). Padahal, ini berurusan dengan rakyat banyak yang memberikan kepercayaan kepada mereka.

Alhasil, Ketua Dewan DPRD Buleleng Gede Supriatna pun harus memanggil pimpinan fraksi soal masalah krusial ini. Jelas dia, sejumlah anggota DPRD Buleleng yang tergabung dalam Pansus II DPRD Buleleng, rupanya malas menghadiri rapat internal pansus. Akibatnya pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), terpaksa ditunda. Padahal, ranperda itu sudah bisa dituntaskan pada masa sidang pertama yang berakhir pada

### DEWAN MALAS DI PANSUS II DPRD BULELENG

- **KETUA** Dewan DPRD Buleleng Gede Supriatna mengumpulkan Ketua Fraksi kemarin.
- **TUJUANNYA**, supaya ketua fraksi bisa mengingatkan anggotanya yang malas rapat internal.
- **KHUSUSNYA**, tergabung dalam Pansus II DPRD Buleleng.



- **AKIBAT** malas rapat internal, Pansus II belum menyelesaikan Ranperda PBB sektor pedesaan dan perkotaan dan ranperda tentang perubahan perda sampah.

- **KETUA** Fraksi akan mengingatkan anggotanya. Bila tidak diindahkan maka BK DPRD Buleleng yang diminta turun tangan.

GRAFIS: GT. DEWANTARA/ RADAR BNALI

Juni lalu.

Pansus II DPRD Buleleng yang dipimpin H. Mulyadi Putra, diketahui membahas dua ranperda. Keduanya adalah ranperda tentang perubahan perda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan, serta ranperda tentang perubahan perda sampah. "Laporan dari ketua pansus dan anggota pansus, hanya ada empat sampai enam orang

yang hadir dalam rapat internal, dari total 21 orang anggota. Kalau begitu terus-terusan, pembahasan untuk mencapai titik temu permasalahan, tidak akan selesai," papar Supriatna kepada pimpinan fraksi kemarin (3/7).

Dari enam fraksi di DPRD Buleleng, hanya tiga fraksi saja yang hadir. Mereka adalah Ketua Fraksi PDI Perjuangan Ni Kadek Turkini, Ketua

Fraksi Demokrat Luh Putu Hesti Ranita Sari, serta Sekretaris Fraksi Nasional Demokrat Made Sudiarta. Sedangkan tiga fraksi lainnya, yakni Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Golkar tidak hadir. "Bukan hanya masalah kehadiran di rapat internal pansus saja, tapi juga kegiatan dan rapat-rapat lainnya yang memang harus dihadiri oleh anggota," ingat dia.

Menurutnya, gara-gara tingkat kehadiran yang rendah, pembahasan dua ranperda yang masuk pada masa sidang pertama hingga kini belum bisa disahkan. Padahal kini sudah masuk dalam masa sidang kedua. Ia khawatir bila masalah itu dibiarkan berlarut-larut, justru menunda pembahasan ranperda lain.

Sementara itu para pimpinan fraksi mengaku akan mendorong kehadiran para anggota. Terlebih fraksi sudah memiliki aturan internal yang mengatur masalah kehadiran anggota. Apabila aturan internal tak berjalan, fraksi mendorong Badan Kehormatan DPRD Buleleng bisa turun tangan untuk melakukan pembinaan. (eps/gup)

Edisi : Radar Rabu, 4 Juli 2018

Hal. : \_\_\_\_\_



## Penutupan Bandara, Pariwisata Mulai Kena Imbas

### Koordinator Terminal Dituntut 1,5 Tahun

**DENPASAR** - Mantan Kepala Dinas Komunikasi Kabupaten Jembrana, Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi dan Koordinator Terminal Manuver Gilimanuk Nengah Darna, yang sebelumnya didudukkan sebagai terdakwa korupsi retribusi di Terminal Manuver Gilimanuk, Rabu (4/7) menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Majelis Hakim yang diketuai Ni Made Sukerani, mengganjar kedua terdakwa dengan hukuman berbeda.

Sesuai amar putusan, terdakwa Gusti Riyadi divonis dengan pidana penjara selama 1 tahun atau lebih ringan 6 bulan dari tuntutan trio Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Jembrana, Made Pasek Budiawan, Mearthi dan Lilik yang sebelumnya menuntut terdakwa Riyadi dengan tuntutan hukuman selama 1 tahun dan 6 bulan (1,5 Tahun), dikurangi sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa penahanan, denda Rp 50 juta subsider 1 bulan penjara. Sedangkan Nengah Darna diganjar 1 tahun dan 6 bulan atau setengah tahun lebih ringan dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan.

Hukuman beda bagi keduanya, karena Hakim menilai, kedua terdakwa terbukti bersalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana dakwaan subsider jaksa.

Sedangkan soal uang pengganti, da-

lam amar putusan hakim, terdakwa tidak dibebani karena sebelumnya yang bersangkutan sudah mengembalikan. Dana yang dikembalikan terdakwa yakni sebesar Rp 190.600.000 dari total nilai kerugian negara sebesar Rp 429.700.000.

Atas vonis itu, para terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya I Gusti Muliarta dkk menyatakan menerima, sedangkan pihak JPU menyatakan pikir-pikir.

Seperti diketahui, hingga kasus ini bergulir berawal dari terdakwa IGN Bagus Putra selaku kadis Kominfo Jembrana ditunjuk bupati Jembrana mengelola PAD (Pendapatan Asli Daerah), yakni berupa retribusi Terminal Manuver Gilimanuk. Selanjutnya, atas penunjukan itu, terdakwa Bagus Putra Riyadi meminta terdakwa Nengah Darna untuk membantunya mengkoordinir di Terminal Manuver Gilimanuk.

Singkat cerita, setelah membuat perangkat, selain terdakwa Darna ditunjuk oleh terdakwa Gusti Riyadi menjadi koordinator, ia juga ditunjuk juga sebagai pembantu bendahara penerima retribusi di terminal manuver Gilimanuk menggunakan karcis.

Selanjutnya dengan diberikannya celah oleh terdakwa Gusti Putra Riyadi saat pengarahan, kemudian terdakwa Darna membuat inisiatif memotong pendapatan retribusi itu sebesar Rp 30 ribu untuk setiap petugas jaga yang jumlahnya 11 orang setiap shif. Pembagian juga diterima oleh Darna sendiri. Polanya, setelah uang retribusi terkumpul, dipotong terlebih dahulu oleh Darna kemudian dibagi. Sisa pendapatan itu diserahkan ke Made Sus Adhi yang kemudian ditransfer ke rekening kas daerah.

Edisi : Kamis, 4 Juli 2018

Hal : \_\_\_\_\_



## **Perbekel Berkasus, Amprah Dana Desa Terhambat**

**SEMARAPURA**- Akibat Perbekel Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Ni Made Ratnadi terseret kasus dugaan penyelewengan pengelolaan APBDes Satra Tahun 2015, amprah (dari kata Belanda 'aanvraag', permintaan) Dana Desa (DD) untuk Desa Satra terhambat. Pasalnya, Desa Satra baru mendapat rekomendasi untuk mengamprah DD-nya pada tanggal 25 Juni 2018 lalu, setelah Sekretaris De-

sanya ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Klungkung, I Wayan Suteja, Selasa (3/7) mengungkapkan, setelah Ratnadi ditetapkan sebagai tersangka, DD desa tersebut yang besarnya mencapai Rp 682.396.000 tidak bisa diamprah. Apalagi pada saat itu, Sekretaris Desa Satra statusnya

hanya sebagai Pelaksana Harian (Plh) lantaran persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri untuk penetapan Sekretaris Desa Satra sebagai Pelaksana Tugas belum keluar. "Baru bulan Mei lalu Sekdesnya ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas," ungkapnya.

Dengan turunnya persetujuan itu, diungkapkannya rekomendasi untuk pengamprahan DD Satra keluar pada tanggal 25 Juni 2018 lalu. Dan

DD tahap pertama sebesar Rp 136.479.200 dan tahap kedua sebesar Rp 272.958.400 sudah diamprah. Meski DD itu baru diamprah, pihaknya optimistis kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan pihak Desa Satra menggunakan DD dapat terealisasi sesuai target. "Sebelum itu, kami juga sudah mendampingi desa agar segera mempersiapkan semua terkait dengan kegiatan, sehingga setelah uang

keluar kegiatan sudah dapat dilaksanakan dengan segera. Kalau desa lain, untuk DD tahap pertama sudah diamprah sejak Januari," katanya.

Lebih lanjut diungkapkannya, DD yang dianggarkan untuk desa-desa di Kabupaten Klungkung di tahun 2018, total jumlahnya mencapai Rp 43.276.499.000. Sebagian besar DD ini dipergunakan untuk kegiatan fisik berkaitan imbauan pemerintah

pusat untuk menggelar padat karya. "Untuk penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Desa sebesar 84,86 persen. Jadi kami yang memelopori kegiatan padat karya ini," ujar Suteja.

Untuk saat ini DD yang sudah diamprah mencapai 60 persen, terdiri dari DD tahap pertama sebesar 20 persen atau sebesar Rp 8.655.299.800 dan DD tahap kedua sebesar 40 persen atau sebesar Rp

17.310.599.600. Adapun hingga saat serapannya mencapai 50,09 persen. "Sebenarnya serapannya di lapangan sudah lebih besar dari itu. Kami hitung serapan dana dari Aplikasi Siskeudes, sehingga desa yang sudah mengerjakan tapi belum membuat atau melengkapi SPJ nya belum masuk ke serapan tersebut. Walaupun libur panjang, kegiatan tetap berjalan sesuai rencana," tandasnya. (ayu/yor)

Edisi : Rabu, 4 Juli 2018  
Hal. : \_\_\_\_\_



# Panji Anom

## Desak Relokasi RPH

### Jorok dan Menebar Bau Tak Sedap

**PANJI ANOM** -Fasilitas Rumah Potong Hewan (RPH) di Banjar Dinas Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, menuai protes dari warga setempat. Warga mendesak pemerintah segera merelokasi fasilitas tersebut. Itu karena dianggap kurang bersih alias jorok. Warga juga merasa tak nyaman karena dampak yang dihasilkan.

Warga menyebut tiap hari selalu timbul bau tidak sedap dari arah rumah potong hewan. Bukan hanya bau, limbah berupa sisa-sisa sapi yang dijagal, tak ditangani dengan baik. Sedikitnya ada 25 kepala keluarga yang terdampak fasilitas RPH itu.

RPH diketahui beroperasi sejak pukul 01.00 dini hari. Biasanya pada pagi hari, bau bu-

suk mulai menyebar ke rumah warga. Bau itu akan bertahan hingga sore hari. Diduga bau muncul karena fasilitas *septic tank* tak berfungsi.

Selain itu, anjing liar sering masuk ke dalam RPH dan memangsa limbah jagal hewan. Baik itu berupa tanduk, tulang, ekor, bahkan terkadang janin sapi. Anjing juga sering membawa sisa-sisa tubuh hewan, ke halaman rumah warga. "Kami sudah lama jadi korban RPH ini. Anjing liar itu sering keluar masuk bawa limbah sapi, entah itu tulangnya, tanduknya, ekornya. Sampai pernah ada janin sapi yang dibawa ke mana-mana oleh anjing liar. Ini artinya *kan* pengelolaan lingkungan di dalam RPH itu sudah *nggak* beres," ujar Putu Mara, salah seorang tokoh masyarakat setempat.

Putu Mara yang juga anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panji Anom itu mengaku sudah melapor ke kantor desa. selain itu pihak

Edisi : Senin, 2 Juli 2018

Hal :



## Radat Bali



EKA PRASETYA/RADAR BALI

**BAU TAK SEDAP:** Rumah Potong Hewan (RPH) di Desa Panji Anom yang diprotes warga lantaran menebar bau dan mengganggu kenyamanan warga.

perbekel juga telah melaporkannya pada instansi terkait. Sayangnya, hingga kini tak kunjung ada tindak lanjut terkait hal tersebut. "Bagaimanapun caranya, limbah itu harus tertangani. Persoalannya kami-kami yang tinggal paling dekat dengan RPH ini yang paling terdampak. Selain itu, kesapakan lingkungan disini, memohon agar RPH ini

dipindahkan dan menolak keberadaan RPH ini," tegas Mara. Sementara itu Perbekel Panji Anom, Made Gina tak menampik keluhan warganya. Gina mengaku pencemaran limbah RPH di Banjar Dinas Batupulu sudah sering dikeluhkan warga dan telah diprotes sejak lama. Keluhan itu juga pernah ia sampaikan ke Dinas Pertanian Buleleng.

Bukan hanya ke dinas, ia juga mengadukan masalah itu pada DPRD Buleleng hingga aparat kepolisian. Sebab ia khawatir masalah keberadaan RPH akan memicu emosi warga. Terlebih cukup lama pengaduan yang ia sampaikan tidak mendapat respons.

"Sudah lebih tiga bulan kami sampaikan di dinas. Kami sudah minta ke Dinas Pertanian biar ada duduk bersama mencari jalan keluar. Tapi sekarang tidak ada respons," ujar Gina.

Idealnya, kata Gina, limbah di RPH dikelola dengan baik sehingga dampak yang muncul bisa ditekan semaksimal mungkin. Ia pun sependapat bila RPH dipindah ke lokasi lain yang jauh dengan pemukiman warga. "Menurut pandangan kami, memang lebih baik dipindahkan saja RPH-nya. Biar tidak menjadi masalah yang berulang terus menerus. Karena yang dirugikan juga warga kami sendiri," tukasnya. (eps/rid)

Edisi : Senin, 2 Juli 2018

Hal : \_\_\_\_\_



Radar Bali

## RPH Temesi Segera Dihibahkan Dewan Kritik Buruknya Perencanaan

**RUMAH** Potong Hewan (RPH) Temesi (PT Mergantaka Mandala) segera dihibahkan oleh Pemprov Bali ke Pemkab Gianyar. Pasalnya, RPH Temesi sudah lama tidak beroperasi dan berkali-kali menjadi temuan BPK-RI. Pemkab Gianyar menyatakan siap menerima, asalkan sudah tidak ada persoalan lagi terkait badan hukum yang kini Perseroan Terbatas (PT).

"Pada prinsipnya temuan-temuan BPK apapun itu wajib hukumnya bagi kita di eksekutif dan legislatif untuk menindaklanjuti sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria)," ujar Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry usai mengikuti *hearing* terkait temuan kepemilikan saham Pemprov Bali pada PT Mergantaka Mandala, di Denpasar, Senin (2/7) kemarin.

Menurut Sugawa Korry,

temuan BPK terutama menyangkut status kepemilikan dan badan hukum dari RPH Temesi. Termasuk mengenai kelanjutan dari RPH itu sendiri, apakah akan difungsikan kembali atau tidak. Misalnya dengan dipailitkan atau dihibahkan.

Pimpinan rapat *hearing* I Gede Kusuma Putra sepakat untuk segera menyelesaikan persoalan RPH Temesi. Setelah dikaji, RPH Temesi akan dihibahkan kepada Pemkab Gianyar. Namun, pihaknya juga tidak ingin proses penghibahan ini nantinya hanya memindahkan masalah dari satu titik ke titik lain.

Sekretaris Komisi II DPRD Bali ini mengkritik perencanaan awal RPH Temesi yang dinilai tidak beres, mengingat nilai investasi Pemprov Bali terbilang cukup besar yakni hampir Rp 5 miliar di tahun 2003.

Kendati demikian, pihaknya tidak mau menyalahkan Pemprov, serta pemerintah pusat yang dulu menawarkan ide.

"Logikanya, duit ada, lahan ada, apalagi yang terlibat pemerintah kabupaten, provinsi, pusat. Ini kan tidak main-main, kok sampai nggak jalan. Sedangkan yang investasi tamat SMP, SMA, kadang-kadang modal cekak bisa jalan. Ini satu bukti perencanaan tidak beres. Saya tidak mau hal semacam ini terjadi ke depan," tegas politisi PDI-P ini.

Karo Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali I Nengah Laba mengatakan, RPH Temesi telah menjadi temuan BPK di tahun 2008, 2009, serta tahun ini atas laporan buku tahun 2017. Pihaknya mengakui bila perencanaan dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa ada kajian mendalam. "Manajemen sudah

tidak jalan, sudah bubar dia. Sekarang tinggal formalitas saja. Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembubaran sebuah PT harus dilakukan melalui pengadilan," imbuhnya.

Sebelum ke pengadilan, harus ada persetujuan dari DPRD Bali dan persetujuan Pemkab Gianyar sebagai penerima hibah. Pada prinsipnya dua hal itu telah dipenuhi. Selanjutnya tinggal membentuk tim appraisal untuk menentukan aset apa saja yang bisa dihibahkan, dan mana yang harus dihapus.

"Kalau bangunan masih bagus bisa dimanfaatkan Gianyar, itu dihibahkan. Tapi kalau mesinnya sudah rusak, hapus saja dari aset daerah karena tidak bisa digunakan. Setelah selesai, baru ada penyerahan hibah kepada Pemda Gianyar secara formal," tegasnya. (kmb32)

Edisi : Selasa, 3 Juli 2018

Hal :



# Ada Tunggakan Hotel Rp 15 Miliar

## Badung Siap Ekspose Para Penunggak

**MANGUPURA** - Berbagai cara disiapkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung untuk memburu wajib pajak (WP) nakal. Bapenda akan memasang spanduk khusus di tempat wajib pajak (WP) yang menunggak pajak. Dalam spanduk itu nantinya tertulis bahwa objek yang dipasang spanduk adalah WP yang tidak mau membayar pajak.

Tidak cukup itu saja. Bapenda juga akan mengekspose ke media WP pengemplang pajak. Dengan adanya sanksi seperti itu diharapkan WP mau menunaikan kewajibannya membayar pajak. Tidak peduli hotel berbintang atau restoran mewah. Semua yang menunggak akan dipasang spanduk.

Aturan pemasangan spanduk tersebut tertuang dalam Perbup No 15/2018 tentang tata cara pemungutan pajak di Kabupaten Badung. Pelaksanaan Perbup sendiri saat ini tinggal menunggu pengesahan. "Setelah Perbup disahkan, maka kami akan terapkan di lapangan. Kami juga akan ekspose di media," ujar Kepala Bapenda Kabupaten Badung, I Made Sutama kepada Jawa Pos Radar Bali, Sabtu (7/7).

Sutama mengungkapkan, pemasangan spanduk di tempat WP nakal tersebut tentu setelah melalui berb-



**Target Rp 10 triliun itu kami optimistis tercapai. Asal tidak ada perubahan situasi ekonomi internasional dan erupsi Gunung Agung. Kalau itu terjadi, maka target bisa direvisi."**

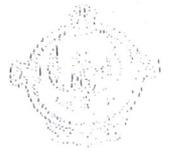
**Made Sutama,**  
Kepala Bapenda Badung

agai tahapan. Sebelum dipasang spanduk akan diberi pembinaan dan peringatan terlebih dahulu. Ditegaskan, pemerintah meminta pajak bukan berarti pemerintah memotong keuntungan WP. Sebab pajak yang diminta pemerintah adalah titipan dari konsumen saat pembayaran. Sutama berharap WP sadar mau menyerahkan pajak titipan konsumen ■

► Baca Ada... Hal 7

Edisi : Sabtu, 7 Juli 2018

Hal : 1 dan 7



## Pembayaran Online Tambal Kebocoran

■ ADA

Sambungan dari hal 1

"Kami bukan menagih uang pribadi WP. Tapi, kami meminta titipan konsumen yang seharusnya diserahkan," tukas pejabat asal Pecatu itu.

Sutama mengakui di Badung masih ada WP yang menunggak. Namun, banyak juga WP yang sudah mulai membayar pajak meski dengan cara mencicil. Sutama mencontohkan salah satu hotel di Kuta yang awalnya menunggak pajak hingga Rp 15 miliar. Setelah didekati akhirnya mencicil pajak senilai Rp 10 miliar. "Tidak semata-mata harus menggunakan ke-

kerasan untuk mendisiplinkan WP," tukasnya.

Bapenda harus bekerja keras lantaran tahun depan Pemkab Badung menargetkan kenaikan pendapatan daerah cukup signifikan. Pendapatan daerah dalam APBD 2019 ditarget Rp 10 triliun lebih atau naik 53,67 persen, meningkat Rp 3,5 triliun dari APBD 2018. Sementara pajak daerah ditarget Rp 8,7 triliun.

"Target Rp 10 triliun itu kami optimistis tercapai. Asal tidak ada perubahan situasi ekonomi internasional dan erupsi Gunung Agung. Kalau itu terjadi, maka target bisa direvisi," papar Sutama.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan itu menambahkan, pendapatan daerah Kabupat-

en Badung masih didulang dari sektor pajak hotel dan restoran (PHR). Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 20 juta ke Indonesia, separonya diprediksi mengunjungi Bali, khususnya Badung. Optimalisasi PHR itulah yang diyakini bisa membuat target pendapatan tercapai.

Apalagi, lanjut Sutama, pajak *online* dengan memasang alat pantau di mesin *cash register* sudah terbukti banyak menambal kebocoran. "Teknologi terus berkembang. Pajak *online* sudah terbukti luar biasa pengaruhnya meminimalkan kebocoran. Dengan pemasangan alat monitor membantu pendapatan dari PHR," beber pria berkumis itu. (san/pit)

Edisi : Sabtu, 7 Juli 2018

Hal : 1 dan 7